

# SKRIPSI

*Taufik Tri Cahyono*

## PRINSIP KETERBUKAAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMODAL BERKAITAN DENGAN MERGER BANK GO PUBLIC



KK  
Per. 10/2/98  
Cab.  
P



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

1998

**SKRIPSI**

**Taufik Tri Cahyono**

**PRINSIP KETERBUKAAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM  
BAGI PEMODAL BERKAITAN DENGAN  
MERGER BANK *GO PUBLIC***



Diajukan sebagai penulisan akhir  
program sarjana bidang ilmu hukum

Dosen pembimbing

Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum.  
NIP. 130 657 517

Penulis

Taufik Tri Cahyono  
NIM. 039313843

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
1998**

**PRINSIP KETERBUKAAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM  
BAGI PEMODAL BERKAITAN DENGAN  
MERGER BANK *GO PUBLIC***

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Penulisan Akhir

Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum

Telah Diuji Pada Tanggal : 6 Agustus 1998.

Tim Penguji Skripsi :

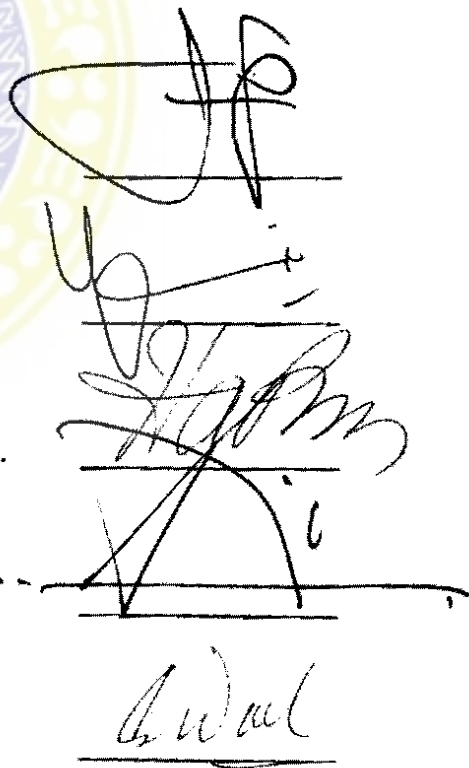
Ketua : H. Samzari Boentoro, SH.

Sekretaris : Wuri Adrijani, SH, M. Hum.

Anggota : Dra. Hj. Soendari Kabat, SH, M. Hum.

H. Ansor Oemar Wongsodiwirjo, SH.

Sri Woelan Azis, SH.

The block contains five handwritten signatures, each written over a horizontal line. The signatures are in black ink and appear to be cursive or stylized. They are positioned to the right of the names of the examiners listed in the text blocks.

## BAB V

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

- a. Penerapan prinsip keterbukaan bank go public terdapat dalam dua tahapan, yaitu :
  - Tahapan pasar perdana, berupa pengumuman Prospektus Ringkas dalam dua surat kabar harian dan penyediaan Prospektus pada Penjamin Emisi dan Agen Penjual.
  - Tahapan pasar sekunder, berupa kewajiban laporan secara berkala dan laporan insidental kepada Bapepam dan RUPS. Salah satu bentuk laporan insidental adalah rencana perusahaan untuk merger.
- b. Merger bank go public dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu yuridis dan strategis. Faktor yuridis berupa tindakan penyehatan bank oleh BI berdasarkan pasal 37 ayat (2) UU Perbankan, sedangkan faktor strategis berupa langkah ekspansif bank. Merger bank-bank go public harus mendapat persetujuan RUPS masing-masing perusahaan, serta mendapat pengesahan Menteri Kehakiman dan mendapat ijin Menteri Keuangan. Dalam pelaksanaan merger, terdapat kendala yang bersifat teknis dan non teknis. Dalam pelaksanaan merger bank go public Bapepam memegang peranan dalam hal menilai kesiapan masing-masing bank serta meneliti kemungkinan adanya pelanggaran oleh bank yang akan merger.

- c. Dalam pelaksanaan merger bank go public, perlindungan hukum bagi pemodal selaku pemegang saham minoritas sangat diperlukan untuk menghindari adanya pemaksaan kehendak oleh pemegang saham mayoritas kepada pemegang saham minoritas. Perlindungan hukum ini telah diberikan oleh pasal 28 ayat (1) UU Perbankan, pasal 104 ayat (1) UU Perseroan Terbatas dan pasal 84 UU Pasar Modal juncto angka 3 Peraturan Bapepam nomor IX.G.1, lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-52/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten.

## 2. Saran

- a. Bank Indonesia perlu lebih meningkatkan pengawasan terhadap keterbukaan yang dilakukan perbankan nasional, dengan jalan memberikan sanksi kepada bank yang tidak memenuhi kewajiban tersebut. Dalam melakukan penilaian kesehatan sebuah bank, Bank Indonesia harus independen dan mengumumkan tingkat kesehatan bank-bank kepada masyarakat.
- b. Prosedur perizinan merger bank perlu disederhanakan tanpa mengabaikan prinsip perlindungan hukum kepada pemodal, serta memberikan insentif kepada bank yang merger. Bank Indonesia selaku pengawas perbankan diharapkan memberikan referensi kepada Menteri Keuangan untuk mengeluarkan keputusan merger bank, sebelum memberikan referensi agar sebuah bank dilikuidasi.

- c. Pemodal perlu dilindungi secara hukum dengan menentukan hak-hak yang dapat mereka lakukan apabila terdapat keputusan merger yang merugikannya. Bentuk perlindungan ini dengan cara menentukan batasan wajar harga saham yang hendak dijualnya karena tidak setuju atas pelaksanaan merger.
- d. Perlu dikeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai merger bank, disamping Peraturan Pemerintah tentang Likuidasi Bank (PP No. 40 tahun 1997) karena bagaimanapun juga likuidasi merupakan langkah terakhir dalam penyehatan sebuah bank.

